

**PENGEMBANGAN MODEL PENDIDIKAN MENENGAH
“SEKOLAH KEBANGSAAN “ DI DAERAH
TERPENCIL, TERTINGGAL, TERLUAR DAN PERBATASAN SEBAGAI
IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN PKn**

Suciati, Ariningsih
Suciatiati21@yahoo.co.id

ABSTRAK

Wilayah perbatasan merupakan kawasan strategis karena letaknya yang langsung berhadapan dengan wilayah negara lain. Persoalannya adalah potensi wilayah perbatasan yang sangat besar tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga wilayah perbatasan selalu tergolong sebagai kawasan yang tertinggal, terisolir, terpencil, dan belum berkembang. termasuk pula dibidang pendidikan, bahwa wilayah perbatasan sebagaimana halnya didaerah daerah lain tingkat pendidikan masyarakat relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan daerah daerah lain. Persebaran saran dan prasarana yang tidak dapat menjangkau desa-desa yang letaknya tersebar dengan jarak yang berjauhan, mengakibatkan pelayanan pendidikan di wilayah perbatasan selalu tertinggal dibanding daerah lainnya (Tri Poetranto, 2003). Untuk itu, pembentukan wawasan kejuangan melalui pendidikan kebangsaan sangat diperlukan, sebagai modal partisipasi masyarakat dalam mengisi pembangunan, terutama masyarakat perbatasan karena mereka memiliki aktivitas kesehariannya selalu bersama dengan penduduk negara tetangga. Perkembangan dan kemajuan daerah perbatasan menjadi simbol dan kebanggaan bangsa sekaligus menjadi pintu gerbang dan cerminan bangsa indonesia di dunia internasional, khususnya negara yang berbatasan langsung.

Kata Kunci : Wilayah perbatasan, dan Pendidikan kebangsaan

PENDAHULUAN

Daerah perbatasan merupakan pintu gerbang yang mudah dipengaruhi baik secara internal maupun eksternal. Oleh karena itu, secara geopolitik daerah/wilayah perbatasan merupakan wilayah frontier atau wilayah abu-abu, tidak jelas atau wilayah yang terkena pengaruh negara lain.

Untuk itu, pembentukan wawasan kejuangan melalui pendidikan kebangsaan sangat diperlukan, sebagai modal partisipasi masyarakat dalam

mengisi pembangunan, terutama masyarakat perbatasan karena mereka memiliki aktivitas kesehariannya selalu bersama dengan penduduk negara tetangga. Perkembangan dan kemajuan daerah perbatasan menjadi simbol dan kebanggaan bangsa sekaligus menjadi pintu gerbang dan cerminan bangsa Indonesia di dunia internasional, khususnya negara yang berbasasab langsung. Oleh sebab itu, program pembangunan untuk masyarakat perbatasan harus jelas yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan, memyentuh kehidupan nyata dan makin memperkokoh wawasan kebangsaan, cinta dan rela berkorban untuk nusa dan bangsa, sekaligus menjadi benteng pertahanan terdepan Indonesia. Daerah tertinggal umumnya ditandai dengan : 1) adanya kesenjangan pada sektor kehidupan 2) tingginya angka kemiskinan 3) tinginya angka penduduk dan pengangguran 4) tingkat pendidikan yang rendah

Permasalahan di dunia pendidikan di daerah terpencil maupun daerah tertinggal, dan perbatasan telah lama kita sadari. Namun dengan keeterbatasan pembiayaan dan berbagai peraturan yang ada selalu dijadikan alasan untuk menunda pemecahan masalah krusial tersebut. Beberapa persoalan kongkrit dalam hal ini adalah betapa sulitnya menempatkan tenaga guru di daerah 3T dan perbatasan, sulitnya membangun sarana pendidikan standar karena kesulitan komunikasi aatau langkanya alat-alat bantu proses belajar mengajar. Begitu pula tuntutan sistem pendidikan yang standar mengenai jenjang pendidikan serta kurikulum nasional menghambat daerah 3T dan perbatasan untuk mengejar ketertinggalan.

Realitas yang dapat diamati antara lain banyak pejabat publik dan politik yang berbicara tentang daerah perbatasan selalu menidentikkan dengan daerah 3T, sehingga daerah perbatasan menjadi sebuah perhatian yang serius dan penting bagi pemerintah. Jika selama ini ada anggapan bahwa wilayah perbatasan sebagai “Beranda Belakang” dan kini telah berubah menjadi “beranda depan”. Persoalannya adalah perubahan pandangan tersebut dan beberapa proyek yang masuk kewilayah perbatasan masih belum berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan mereka yang tertinggal dan memerlukan perhatian yang serius dari berbagai pihak.

Wilayah perbatasan merupakan kawasan strategis karena letaknya yang langsung berhadapan dengan wilayah negara lain. Persoalannya adalah potensi wilayah perbatasan yang sangat besar tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga wilayah perbatasan selalu tergolong sebagai kawasan yang tertinggal, terisolir, terpencil, dan belum berkembang. termasuk pula di bidang pendidikan, bahwa wilayah perbatasan sebagaimana halnya di daerah lain tingkat pendidikan masyarakat relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Persebaran sarana dan prasarana yang tidak dapat menjangkau desa-desa yang letaknya tersebar dengan jarak yang berjauhan, mengakibatkan

pelayanan pendidikan di wilayah perbatasan selalu tertinggal dibanding daerah lainnya (Tri Poetranto, 2003).

Fenomena kehidupan hampir sebagian besar wilayah perbatasan menunjukkan indikasi termasuk kategori miskin, sehingga persoalan demikian dapat mengakibatkan rendahnya karakter kebangsaan dan akhirnya berdampak pada kesetiaan dan loyalitas terhadap negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini penting untuk mendapatkan perhatian serius dari pemerintah karena warganegara Indonesia di perbatasan merupakan gambaran nyata identitas Indonesia terhadap negara lain (Depkimpraswil, 2002).

Membangun nasionalisme kebangsaan tidak bisa dilepaskan dari konteks wawasan kebangsaan dan pembentukan karakter pribadi yang berdasarkan budaya masyarakat. Membangun karakter kebangsaan bukanlah pekerjaan yang mudah dan pembangunan demikian memerlukan pendekatan yang komprehensif yang dilakukan secara sistematis, eksplisit, dan berkesinambungan. Bahkan tidak menutup kemungkinan warga Indonesia di perbatasan pindah kewarganegaraan, tetapi mereka tetap tinggal di wilayah NKRI. Disamping sarana pendidikan yang sangat terbatas, minat penduduk terhadap pendidikan pun masih relatif rendah. Fenomena ini dapat dilihat dari banyaknya penduduk daerah perbatasan yang meninggalkan desa untuk bersekolah namun tidak menyelesaikan sekolahnya. Beberapa masalah pendidikan yang sering dijumpai di daerah perbatasan adalah: 1) masih tingginya angka putus sekolah; 2) banyak anak yang akibat ekonomi orang tua yang tergolong tidak mampu, korban trafficking, korban narkoba, korban HIV/AIDS; 3) Motivasi orang tua untuk menyekolahkan anaknya kurang; 4) fasilitas pendidikan yang sedikit dan relatif jauh dari jangkauan warga. Persoalannya adalah belum ada lembaga yang mampu menampung mereka yang putus sekolah. Oleh karena itu, perlu adanya pelayanan khusus yang akses ke daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau sehingga dapat membantu persoalan-persoalan di atas melalui pendidikan non formal terutama peserta didik usia 16 tahun sampai dengan 18 tahun seperti: guru kunjung, mobil pintar, perpustakaan keliling sekolah satu atap, sekolah berasrama, kelas berjalan, kelas kecil, dan bentuk-bentuk lain pembelajaran yang bisa dilakukan untuk mengatasi persoalan warga belajar yang belum bisa menjangkau sampai daerah 3T wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Jika pembelajaran dan penyusunan kurikulum selama ini berorientasi pada kelas kelas reguler maka pendidikan daerah 3T dan perbatasan perlu diambil sebuah kebijakan kurikulum baru yang mengarah pada kecakapan hidup (soft skill) yang dapat dijadikan mata pencaharian pokok peserta didik setelah tamat. Muatan pendidikan karakter setelah secara psikologis mencakup dimensi *moral reasoning*, *moral Filling*, *moral behavior* (Licnona: 1991)

Model ini merupakan salah satu alternatifnya untuk melayani pendidikan yang tidak terjangkau. Oleh karenanya, model pendidikan menengah layanan

khusus “Sekolah Kebangsaan” memberikan forsi penguatan kepada life skill dalam proses pembelajaran dengan pendekatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah, 3T dan perbatasan sehingga mereka dapat menghasilkan sumberdaya manusia profesional yang dapat diandalkan dan unggul untuk menghadapi persaingan global dengan memanfaatkan potensi lokal yang tersedia. (Anwar,2004)

Wilayah yang dapat digolongkan sebagai daerah terpencil, harus memenuhi 2 (dua) persyaratan bersifat komulatif yaitu : (1) daerah itu sulit dijangkau karena kekurangan atau keterbatasan prasarana dan sarana angkutan umum, baik darat, laut, maupun udara, dan (2) prasarana dan sarana sosial dan ekonomi tidak tersedia, atau walaupun tersedia dalam keadaan terbatas, sehingga pengusaha yang akan menjalankan usahanya (para penanam modal) harus menyediakan sendiri prasarana dan sarana sosial dan ekonomi.

Selama ini ada anggapan keliru dan terus berjalan bertahan dalam jangka waktu yang relatif lama bahwa hanya wilayah perkotaan yang merupakan wajah depan Indonesia. Untuk itu, paradigma terbalik demikian harus diubah bahwa wajah depan Indonesia adalah terlihat dan tercermin di wilayah perbatasan. Selain itu, bentuk usaha percepatan pertumbuhan perekonomian perbatasan yang berbasis kerakyatan antara lain : a) penguatan kapasitas penguatan kelembagaan masyarakat adat/kelompok-kelompok swadaya masyarakat yang sudah ada; b) pemberdayaan, pendampingan dan penguatan peran serta perempuan dalam kegiatan perekonomian atau sosial; (c) pengembangan wawasan kebangsaan masyarakat dikawasan perbatasan; (d) menghidupkan peran lembaga keuangan mikro dalam peningkatan pertumbuhan perekonomian ; (e) Identifikasi potensi dan pengembangan sektor-sektor unggulan di daerah perbatasan (Tri Poetranto, 2003)

Sekolah kebangsaan di inspirasi dari konsep wawasan kebangsaan Indonesia. Wawasan ini bermakna sebagai sudut pandang suatu bangsa dalam memahami keberadaan jati diri dan lingkungannya sesuai dengan keadaan wilayah suatu negara dan sejarah yang dialaminya.

Wawasan ini juga menentukan cara suatu bangsa memanfaatkan kondisi geografis, sejarah dan sosial budayanya dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasionalnya serta bagaimana bangsa itu memandang diri dan lingkungannya baik kedalam maupun keluar, sehingga wawasan kebangsaan ini memunculkan sebuah konsep tentang sekolah kebangsaan.

Pewarisan nilai-nilai kebangsaan tersebut dapat dikerjakan oleh para guru dengan menanamkan nilai-nilai universal seperti; kejujuran dan integritas, cinta pada pekerjaan, mau kerja keras dan tepat waktu. Secara praktis penanaman nilai

nilai kebangsaan perlu dilakukan oleh segenap anak bangsa baik perkotaan maupun di daerah 3T dan perbatasan. (andrias harefa).

PEMBAHASAN

Karakteristik kompetensi pendidikan yang berbeda antara SMA dan SMK perlu dijumpai agar pendidikan menengah dapat memberikan layanan yang lebih variatif. Perlu dipikirkan pengembangan konsep multi exit multi entry pada jenjang pendidikan menengah. Tidak jauh berbeda dengan daerah perbatasan yang lain yang ada di Indonesia, pendidikan menengah di daerah 3T Kalimantan Barat mengalami beberapa permasalahan serius terkait kondisi pendidikan yang ada di perbatasan antara lain : a) secara umum, taraf hidup dan kesejahteraan warga Malaysia jauh lebih baik dibandingkan warga Indonesia yang tinggal di wilayah perbatasan seperti taraf hidup, infrastruktur, fasilitas sekolah sangat memadai, menonton televisi siaran Malaysia, belanja berbagai kebutuhan pokok ke Malaysia, listrik dan kendaraan dari Malaysia; b) ada warga yang anak-anaknya sekolah kenegara tetangga, bekerja dan menjadi warga tetangga, sedangkan orang tua tetap tinggal di wilayah NKRI (perbatasan). Mereka mau dan bersedia pindah kewarganegaraan karena ia mendapat tawaran pendidikan gratis, jaminan pekerjaan dan kemakmuran yang tidak mungkin bisa mereka dapatkan di wilayahnya; c) ada sebagian WNI yang bermukim di wilayah perbatasan yang tidak mengenal presidenya (Indonesia) sendiri, kurang paham atau kesulitan dengan bahasa Indonesia, tidak mengenal bendera dan dasar negaranya serta (3) kurang bangga dan cinta dengan bangsa dan negaranya. Berpijak dari kondisi eksisting bahwa pendirian sekolah menengah kebangsaan menjadi kebutuhan dan sekaligus dapat dijadikan argumentasi untuk mengatasi masalah krusial di daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan. Pendidikan sekolah menengah kebangsaan merupakan proses pembelajaran yang meliputi semangat kebangsaan yang mempunyai cita-cita nasional, mengembangkan eksistensi Indonesia atas nilai-nilai kehidupan nyata, pengembangan kompetensi, pengembangan kultur bangsa Indonesia yang berbhinneka tunggal ika yang berkarakter yang wajib dimiliki masyarakat perbatasan sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang berbatasan dengan negara Sarawak Malaysia Timur.

Secara umum alasan sekolah menengah kebangsaan hadir disebabkan beberapa faktor antara lain :
berdasarkan geografi
Lokasi sekolah yang sangat sulit dijangkau oleh para peserta didik di daerah terpencil tertinggal daerah perbatasan.

1. Infrastruktur jalan yang jelek
2. Pemukiman penduduk lebih dekat ke sekolah negara tetangga perbatasan

3. Keterjangkauan akses masyarakat lebih dekat ke negara tetangga

Berdasarkan ekonomi

1. Potensi alam yang dimiliki belum optimal digali
2. Angka kemiskinan cukup tinggi
3. Jaminan biaya pendidikan yang cukup tinggi oleh negara tetangga
4. Jaminan kerja bagi alumni oleh negara tetangga cukup memadai

Berdasarkan pendidikan

5. Angka putus sekolah dan drop out cukup tinggi
6. Belum ada sekolah menengah atas maupun kejuruan yang terdekat
7. Kekurangan guru dan mismatch
8. Keberadaan perusahaan sawit perlu dicermati dampaknya

Berdasarkan mobilitas dan sikap penduduk

1. Pemukiman terpencar / tersebar
2. Krisis nasionalisme
3. Perlakuan khusus oleh negara tetangga
4. Ancaman naturalisasi
5. Banyaknya pilihan lapangan pekerjaan di negara tetangga
6. Pendapatan lebih tinggi bekerja dinegara tetangga
7. Fasilitas hidup lebih terjamin di negara tetangga

Berdasarkan dukungan pendirian

1. Tokoh masyarakat dan pemerintahan desa yang memiliki lahan (16 Ha milik pemda)yang siap dibangun sekolah kebangsaan
2. Dewan penyantunan
3. Donatur pembiayaan
4. Material pembangunan (kayu)
5. Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana sekolah yang ada
6. Dewan pendidikan / komite sekolah

Berdasarkan pembiayaan / anggaran

1. Pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten :
2. Masyarakat

Muatan pembelajaran pendidikan menengah “sekolah kebangsaan” terdiri dari : model pembelajaran living history, pendidikan nilai – nilai kejuangan, pendidikan life skill, pendidikan karakter, pendidikan kewirausahaan, pendidikan bela negara, dan muatan lokal yang dapat diuraikan dalam strategi pembelajaran pada tabel 1 berikut.

| | |
|------------------|----------------------|
| Muatan kurikulum | Strategi pelaksanaan |
|------------------|----------------------|

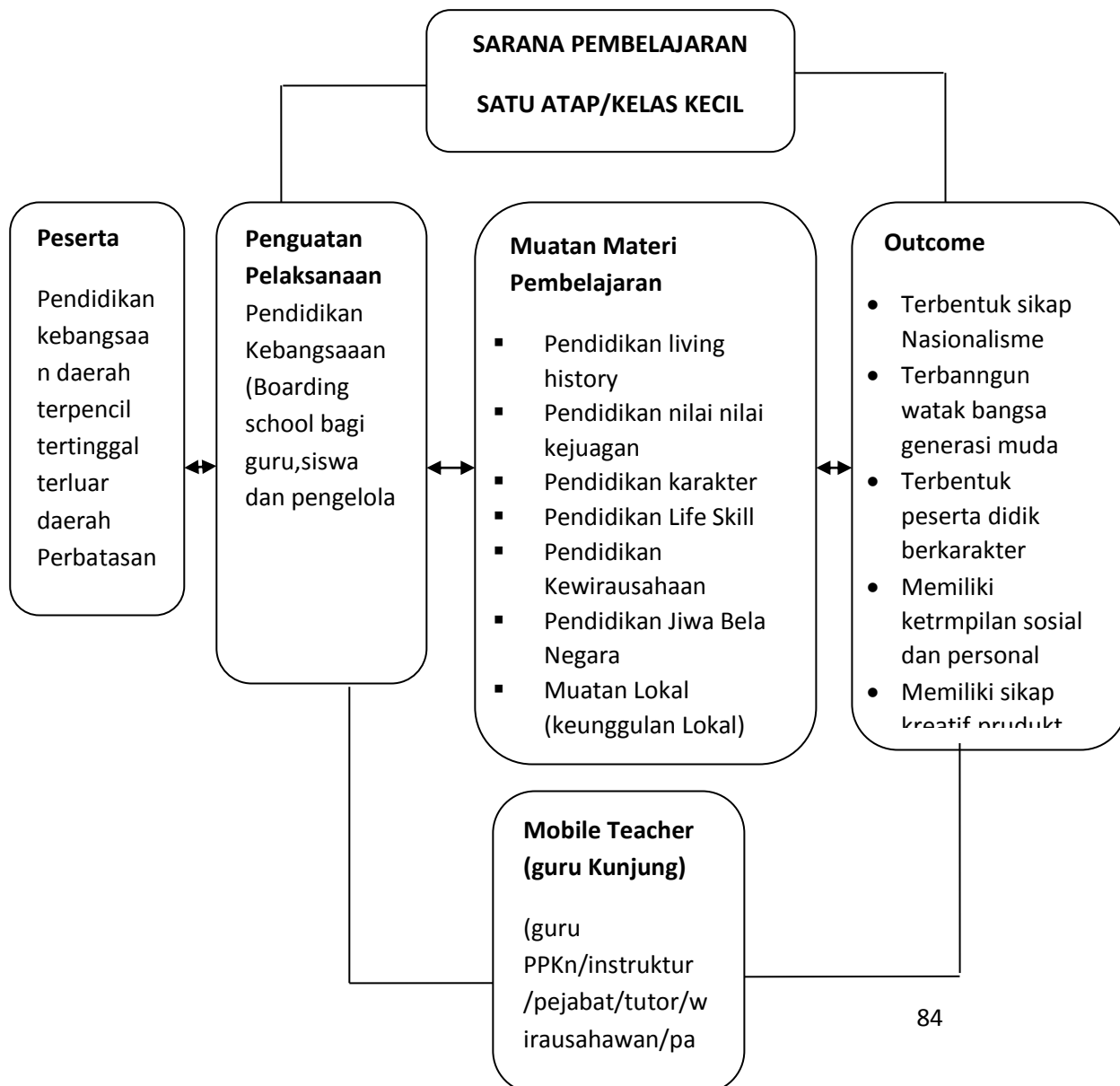
| | |
|------------------------------------|--|
| Pendidikan living history | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengaitkan materi dengan contoh – contoh kejadian lokal 2. Melakukan kunjungan langsung ke sumber sejarah 3. Melakukan studi kasus mengenai apek sejarah sekitar lingkungan peserta didik |
| Pendidikan nilai – nilai kejuangan | <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengembangkan aktifitas peserta didik melakukan telaah berbagai peristiwa antara lain ada pesan – pesan yang terkait dengan nilai – nilai kepahlawanan seperti keteladanan, kemerdekaan, kesetaraan, nasionalisme dan patriotisme 2) Mengaktualisasikan kembali nilai – nilai jati diri dan hak – hak individu atau hak – hak asasi manusia, nilai – nilai kemanusiaan, nilai – nilai nasionalisme dan patriotisme |
| Pendidikan karakter | <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyampaikan pengetahuan tentang moral seperti cerita kepahlawanan dan kisah kehidupan orang bijak 2) Menanamkan perasaan tentang moral seperti kasih sayang, hormat menghormati, saling menghargai 3) Melakukan perbuatan bermoral pembiasaan – pembiasaan yang baik dilakukan oleh guru |
| Pendidikan life skill | <ol style="list-style-type: none"> 1) Proses identifikasi kebutuhan belajar 2) Proses penyadaran belajar bersama 3) Keselarasan kegiatan belajar mengajar untuk mengembangkan diri, usaha mandiri dan usaha bersama 4) Proses pengembangan ketrampilan diri, kecakapan personal, social, akademik, vocational, manajerial, dan kewirausahaan 5) Mensinergikan berbagai |

| | |
|-----------------------------------|---|
| | <p>pelajaran menjadi sebuah kecakapan hidup</p> <p>6) Pendampingan teknis untuk bekerja</p> |
| Pendidikan kewirausahaan | <ol style="list-style-type: none"> 1) nilai – nilai kewirausahaan ke dalam pembelajaran 2) pembiasaan nilai – nilai kewirausahaan kedalam tingkah laku peserta didik sehari – hari melalui proses pembelajaran baik yang berlangsung di dalam maupun diluar kelas pada semua mata pelajaran 3) menjadikan peserta didik menguasai kompetensi (materi) yang ditargetkan, peduli, dan menginternalisasi nilai – nilai kewirausahaan 4) pengintegrasian nilai – nilai pokok ke semua mata pelajaran yang mengandung 6 (enam) perilaku : mandiri, kreatif pengambil resiko, kepemimpinan, orientasi pada tindakan dan kerja keras |
| Pendidikan bela negara | <ol style="list-style-type: none"> 1) Sistem pembelajaran constructive dan active learning 2) Nilai – nilai yang dikembangkan : cinta tanah air, kesadaran dan etika berbangsa dan bernegara 3) Mengembangkan sikap peduli dan tanggap terhadap kondisi dan situasi negara dan bangsa |
| Muatan lokal (keunggulan lokal) | <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengajarkan peserta didik untuk dekat dengan situasi kongkrit yang mereka hadapi sehari – hari disekitarnya. 2) Pendidikan keunggulan lokal diajarkan sebagai media untuk melestraikan potensi masing – masing daerah |

Suksesnya program pendidikan menengah sekolah kebangsaan ini dapat dikembangkan dan dilaksanakan dengan baik jika :

1. Program ini didukung oleh pendanaan dari berbagai pihak dari level pemerintah pusat, pemerintah daerah sampai stakeholder.

2. Penetapan lokasi yang tepat dan strategis dari berbagai dusun/ desa terpencil dan tertinggal di wilayah perbatasan
3. Adanya Asrama bagi peserta didik (boarding School) sekolah kebangsaan dengan manajemen yang baik.
4. Adanya biaya pendidikan gratis
5. Proses pembelajaran didukung sarana prasarana dan alat alat pembelajaran mengacu pada muatan kurikulum sekolah kebangsaan
6. Pemanfaat gedung sekolah menggunakan sekolah negeri yang sudah ada (SATAP)
7. Pelaksanaan pembelajaran pendidikan menengah sekolah kebangsaan dilakukan outbond
8. Penilaian pembelajaran dititik beratkan pada perubahan sikap dan ketrampilan psikomotorik
9. Adanya dukungan moril, material maupun teknis dari semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dewan pendidikan, komite sekolah dan perangkat sekolah yang ada.



**Gambar 1. Blue print model pendidikan menengah layanan khusus
“Sekolah Kebangsaan”**

KESIMPULAN

Model ini menampung aspirasi baru tentang pendidikan menengah sekolah kebangsaan daerah terpencil, tertinggal, terluar, dan daerah perbatasan dengan mencoba memodifikasi pola kurikulum dengan model pembelajaran yaitu kurikulum pendidikan yang memiliki muatan kebangsaan seperti pembelajaran PKN dan nilai-nilai kejuangan berbasis karakter dan life skill berjiwa bela negara dengan memperhatikan keunggulan lokal yang dimiliki daerah perbatasan, sehingga dapat diterapkan sebagai suatu proses dan model pembelajaran yang layak dan sesuai dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia khususnya di daerah 3T dan perbatasan.

Model Pembelajaran ini bisa membentuk sikap nasionalisme dikalangan generasi muda, memperkuat semangat kebangsaan yang mempunyai cita-cita nasionalisme, pengembangan kultur bangsa Indonesia yang berbhentika tunggal ika yang berkarakter yang wajib dimiliki semua warga Negara Indonesia terutama bagi kalangan generasi muda sebagai generasi penerus bangsa.

DAFTAR RUJUKAN

- Anwar, 2004 Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills Education) Konsep dan aplikasi, Bandung : Penerbit Alfabeta
- Departemen pendidikan dan Kebudayaan. 2002, Pedoman Umum Pelaksanaan Pendidikan Berbasis Keterampilan Hidup (life skill) melalui pendidikan Broad Base Education dalam pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda, Jakarta, Ditjen PLS dan Pemuda- Depdiknas.
- Depkimpraswil, 2002, strategi dan konsepsi Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara. Jakarta
- Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan layanan khusus pendidikan menengah, 2012 Panduan Pelaksanaan daerah perbatasan/ Terpencil/ Tertinggal /pulau terluar: Jakarta: dirjen Pendidikan Menengah Pendidikan Khusus dan layanan Khusus.

Tri Poetranto,2003 bagaimana mengatasi Permasalahan di daerah Perbatasan,
Jakarta: Buletin Puslitbang Strahan Balitbang Dephan